

EFEKTIVITAS PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU) DI KAWASAN KUMUH MUARA ABU KELURAHAN OESAPA BARAT KECAMATAN KELAPA LIMA KOTA KUPANG

Umbu TW Pariangu ^{1*}, Milyesdehimne Nainel ²

Prodi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Nusa Cendana, Kupang, Indonesia ^{1,2}

*Email: umbu.umbupariangu@staf.undana.ac.id

ABSTRACT

Muara Abu, located in Oesapa Barat Urban Village, Kelapa Lima Sub-District, Kupang City, is one of the priority areas for the implementation of the KOTAKU Program. This area has a chaotic building layout, poor road conditions, lack of waste facilities, inefficient waste system, minimal clean water supply from PDAM or has not met the criteria for clean water minimum service standards (SPM), environmental road conditions, drainage, and wastewater management systems, which do not meet technical standards and health aspects. This study aims to determine the effectiveness of the programme implementation using input, process and output variables. Each stage is described through analysis to obtain coherence so that it can be concluded whether the KOTAKU Programme has been effective or otherwise. This research uses a qualitative approach with a descriptive research type. Data was collected using observation, interview and documentation techniques, then analysed through data reduction, data presentation and conclusion drawing. The results showed that the implementation of the KOTAKU Programme in Muara Abu has not been effective from the input-process and output aspects as a whole. Some infrastructure has been built to change the landscape of the region. However, holistically, the program has not been able to stimulate support and active participation from the community to contribute ideas and positive behaviour for the continuity of the program's impact. The Kupang City Government also needs to regularly evaluate the implementation of the KOTAKU Programme to ensure that the facilities built are in line with quality and sustainability requirements.

Keywords: *Effectiveness, Slum Areas, Cities Without Slums*

ABSTRAK

Muara Abu yang terletak di Kelurahan Oesapa Barat, Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang menjadi salah satu wilayah prioritas pelaksanaan Program KOTAKU. Wilayah ini memiliki tata bangunan yang semrawut, kondisi jalan yang buruk, sarana sampah yang masih kurang, sistem persampahan belum efisien, pasokan air bersih minim dari PDAM atau belum memenuhi kriteria standar pelayanan minimal (SPM)

air bersih, kondisi jalan lingkungan, drainase, dan sistem pengelolaan air limbah, yang tidak sesuai standar teknis dan aspek kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas pelaksanaan program tersebut dengan menggunakan variabel input, proses maupun output. Tiap-tiap tahap dideskripsikan lewat analisis untuk mendapatkan koherensi sehingga bisa disimpulkan apakah Program KOTAKU sudah efektif atau sebaliknya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data dikumpulkan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis lewat reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan Program KOTAKU di Muara Abu belum efektif dilihat dari aspek input-proses maupun output secara keseluruhan. Beberapa infrastruktur sudah dibangun untuk merubah lanskap wilayah. Hanya saja secara holistik, program tersebut belum mampu merangsang dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat untuk berkontribusi menyumbangkan gagasan maupun perilaku positif demi kontinuitas dampak program dimaksud. Pemerintah Kota Kupang juga perlu mengevaluasi pelaksanaan Program KOTAKU secara berkala untuk memastikan bahwa fasilitas yang dibangun sudah sesuai dengan syarat kualitas dan keberlanjutan,

Kata Kunci: *Efektivitas, Wilayah Kumuh, Kota Tanpa Kumuh*

PENDAHULUAN

Berdasarkan UU No.1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan sesuai dengan arah kebijakan Pembangunan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) merupakan salah satu upaya strategis untuk mengakselerasi penyelesaian permukiman kumuh di perkotaan dalam wujud “Gerakan 100-0-100”, yaitu 100 persen akses air minum layak, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak.

Dalam penyelesaian permasalahan kumuh, Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang mengeluarkan Surat Keputusan Walikota tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh No. 220/KEP/HK/2014 dengan

luas 47,37 Ha, yang terdiri dari 12 Kelurahan. Melalui intervensi dan kolaborasi maupun bantuan dana investasi (BDI) tahun 2017, telah diselesaikan luasan kawasan kumuh di lokasi Oesapa Barat seluas 47,37 Ha dengan intervensi program yaitu jalan paving block, vol : 1.040 m, motor atau gerobak sampah vol : 35 unit, mandi cuci kakus (MCK) vol : 3 unit, sumur resapan air hujan vol : 18 unit, ruang terbuka non hijau vol : 100 m², sumur bor vol : 1 unit, bak sampah 3R vol : 99 unit, konteiner sampah vol : 3 unit.

Pada tahun 2018, yang menjadi target dari program KOTAKU untuk penanganan wilayah kumuh terdapat di 24 kelurahan dengan luasan kawasan kumuh sebesar 118,15 Ha. Sesuai SK Walikota Tahun 2018, melalui dana kolaborasi dan Bantuan Dana Investasi (BDI) tahun anggaran 2018 telah diselesaikan

penanganan luasan kawasan kumuh seluas 90,89 Ha dengan intervensi program yaitu sumur bor dan tower 1 unit, rehab jalan beton vol: 253 m, jalan beton vol: 117 m, jalan paving vol: 55 m, motor sampah 1 unit, kontainer sampah 1 unit, drainase vol: 244 m.

Selanjutnya di tahun 2019 Pemkot menyusun review Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKP) khusus Kawasan Prioritas yaitu Kawasan Oesapa yang mana terdiri dari 2 kelurahan yaitu Kelurahan Oesapa

dan Kelurahan Oesapa Barat. Pada tahun 2021 yang menjadi target dari program KOTAKU untuk penyelesaian kumuh menyasar 20 kelurahan dengan luasan kawasan Kumuh sebesar 123,95 Ha. Sesuai dengan SK Walikota Kupang terbaru Nomor 155A/KEP/HK/2020, dan diharapkan penanganannya bisa selesai pada tahun 2024 dengan berkolaborasi dari berbagai pihak dan peran aktif Pokja PKP dan Forum PKP. Luas lokasi permukiman kumuh Kota Kupang dapat di dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Lokasi Pemukiman Kumuh di Kota Kupang

| No | Lokasi | Luas (Ha) | Kelurahan/Desa | Kecamatan |
|----|-----------------|-----------|-----------------|-------------|
| 1 | Airnona | 4,17 | Airnona | Kota Raja |
| 2 | Bonipoi | 2,13 | Bonipoi | Kota Lama |
| | Oesapa Barat-1 | 12,6 | | |
| 3 | Oesapa Barat-2 | 2,83 | Oesapa Barat | Kelapa Lima |
| | Oesapa Barat-3 | 10,88 | | |
| 4 | Oetete | 1,10 | Oetete | Oebobo |
| 5 | Oesapa-1 | 4,35 | Oesapa | Kelapa Lima |
| | Oesapa-2 | 2,66 | | |
| | Oesapa-3 | 1,91 | | |
| | Oesapa-4 | 2,70 | | |
| | Oesapa-5 | 19,58 | | |
| 6 | Pasir Panjang | 2,06 | Pasir Panjang | Kota Lama |
| 7 | Penfui | 1,88 | Penfui | Maulafa |
| 8 | Todekisar | 0,59 | Todekisar | Kota Lama |
| 9 | Tuak Daun Merah | 1,16 | Tuak Daun Merah | Oebobo |
| 10 | Kayu Putih | 1,63 | Kayu Putih | Oebobo |
| 11 | Fatubesi | 1,13 | Fatubesi | Kota Lama |
| 12 | Kuanino | 1,76 | Kuanino | Kota Raja |
| 13 | Lasiana | 11,95 | Lasiana | Kelapa Lima |
| 14 | Liliba | 11,86 | Liliba | Oebobo |
| 15 | Mantasi | 1,07 | Mantasi | Alak |

| | | | | |
|----|--------------|--------|-------------|-------------|
| 16 | Naimata | 7,52 | Naimata | Maulafa |
| 17 | Fatukoa | 3,17 | Fatukoa | Oebobo |
| 18 | Oebobo | 1,53 | Oebobo | Oebobo |
| 19 | Kelapa Lima | 10,9 | Kelapa Lima | Kelapa Lima |
| 20 | Merdeka | 0,83 | Merdeka | Kota Lama |
| | Total | 123,95 | | |

Sumber: SK Walikota Kupang Nomor 155A/KEP/HK/2020, Tahun 2023

Nampak 20 kelurahan di Kota Kupang masih teridentifikasi sebagai wilayah kumuh/belum memenuhi kriteria berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 14 tahun 2018. Kemudian Pemkot dalam rencana penataan kawasan menetapkan prioritas penanganan di Kelurahan Oesapa Barat yaitu pada lokasi Oesapa Barat 1 (Muara Abu) dengan luasan kumuh 12,6 Ha. Pemilihan kawasan Kelurahan Oesapa Barat, khususnya Muara Abu sebagai kawasan prioritas berkaitan erat dengan konsep penataan ruang Kota Kupang sebagai Water Front City, maupun amanah yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) maupun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Kupang, yang mengarahkan pembangunan infrastruktur permukiman dilakukan dalam rangka menunjang kawasan strategis ekonomi dan pariwisata.

Demi menuntaskan permasalahan kumuh di Kelurahan Oesapa Barat khususnya di kawasan prioritas Muara Abu, RT 001/RW 001, pemerintah telah melakukan Kolaborasi bersama OPD (Organisasi Perangkat Daerah) sejak Tahun 2019 untuk penataan kawasan kumuh dengan sumber pendanaan dari APBD sebesar Rp.14.567.000.000 yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur seperti: jalan hotmix, ruang

terbuka publik berupa taman, drainase U-ditch, dan pelindung sungai. Meskipun kegiatan penataan kawasan kumuh telah dilakukan sejak 2018, akan tetapi hal tersebut belum ditunjang dengan kesadaran masyarakat dalam melestarikan lingkungan, yang terlihat dari sikap oknum masyarakat yang masih membuang dan menimbun sampah di sekitaran sungai kawasan Muara Abu sehingga lingkungan di sekitar sungai masih terlihat kumuh.

Pada tahun 2021 pemerintah kembali melakukan penataan kawasan kumuh di Kelurahan Oesapa Barat RT 001/RW 001 dengan sumber pendanaan dari Kementerian PUPR melalui APBN. Adapun beberapa indikator kekumuhan di Kelurahan Oesapa Barat, khususnya Muara Abu yakni, tata bangunan yang semrawut, kondisi jalan yang buruk, sarana sampah yang masih kurang, sistem persampahan belum efisien, pasokan air bersih minim dari PDAM sehingga belum memenuhi kriteria standar pelayanan minimal (SPM) air bersih (80 liter/orang/hari), kondisi jalan lingkungan, drainase, dan sistem pengelolaan air limbah, yang tidak sesuai standar teknis dan aspek kesehatan.

Untuk mengatasi permasalahan permukiman kumuh tersebut, maka Pemkot Kupang melaksanakan penataan

Kawasan Oesapa Segmen II Muara Abu. Dalam buku dokumen RPL (Rencana Penyiapan Lahan) Kota Kupang, untuk penataan kawasan Oesapa Segmen II Muara Abu, kegiatan penataan dipusatkan di RT 001-RW 001 Muara Abu, Kelurahan Oesapa Barat-1, seperti yang dituangkan dalam memorandum program dan Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) yang disepakati Pemkot Kupang.

Berdasarkan observasi awal, meskipun Program KOTAKU telah dilaksanakan akan tetapi program tersebut belum bisa berjalan secara efektif, termasuk belum mampu mengubah pola hidup dan perilaku masyarakat demi hadirnya permukiman yang bersih dan sehat. Misalnya terlihat dari sampah-sampah yang masih berserakan di sekitar tempat tinggal masyarakat, fasilitas atau infrastruktur yang tidak bertahan lama penggunaannya, misalnya sumur bor yang baru dibuat namun sudah tidak lagi berfungsi sehingga tidak dapat digunakan oleh masyarakat, hingga tidak terpenuhinya akses air minum di Kelurahan Oesapa Barat RT 001/RW 001.

Penelitian terdahulu terkait Program KOTAKU dititik-beratkan pada derajat implementasi programnya. Sejauh mana program tersebut berhasil diimplementasikan dengan indikasi pada kerangka *partisipasi masyarakat*. Meskipun voluntarisme masyarakat secara parsial masih terlihat dalam wujud sumbangan materil maupun tenaga. (Nurhasanah, 2019; Rahayu et al, 2020; Sulaiman, 2021). Sedangkan penelitian (Ahmad, 2022; Efendi et al, 2023;

Rabbani, 2023), lebih menyorot pada aspek manajemen dan kolaborasi di dalam implementasi program KOTAKU yang pengamatannya berbasis pada efisiensi dan efektivitas padam segmen syarakat di kota maupun di wilayah periferialnya. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwasanya mayoritas masyarakat memandang Program KOTAKU secara efektivitas dan efisiensi memiliki hubungan yang positif untuk mencapai apa yang diaspirasikan rakyat. Aspek kolaborasi kemudian menjadi variabel yang ikut menentukan keberhasilan program meskipun secara manajemen diperlukan perbaikan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Septanaya et al., 2020; Ramandei, 2023; Nurahman, 2023) analisisnya dengan mengidentifikasi gejala yang mewarnai mozaik kapasitas masyarakat dalam penerapan program yakni: pengetahuan, keterampilan, akses dalam pengambilan keputusan, sehingga hasil penelitian menunjukkan ada perubahan *mindset* pada masyarakat, adopsi keterampilan dalam perencanaan hingga eksekusi program lebih bersifat populis. Terutama dalam mewujudkan KOTAKU yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Sedangkan penelitian ini penulis menekankan efektivitas Program KOTAKU dengan mengelaborasi dari aspek input, proses dan output (Sedarmayanti, 2019). Hal ini dilakukan untuk meligat sejauh mana tahapan pelaksanaan program tersebut sesuai dengan prosedur baik mekanisme formal dan level partisipasi masyarakat di setiap tahapan tersebut. Di sini agentifikan

program dalam hal ini pemerintah maupun penerima manfaat (*beneficiaries*) sama-sama berperan penting dalam efektivitas program. Karenanya penelitian ini penting bagi kajian-kajian selanjutnya di dalam mengkolaborasikan elemen aktor formal atau partisipasi yang melibatkan masyarakat hingga sumber daya, berupa dukungan material maupun sosial, yang memungkinkan terjadinya integrasi dan penguatan program-program populis sejenis di masa mendatang. Dengan demikian tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di kawasan kumuh Kelurahan Oesapa Barat Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Di mana menurut Sugiyono (2019) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, yang digunakan untuk meneliti permasalahan yang membutuhkan kajian atau analisis yang kompleks berdasarkan kondisi alamiah (Moleong, 2007). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara, kuesioner dan studi literature. Teknik wawancara/kuesioner dilakukan kepada informan yang diseleksi, yang disandingkan dengan data sekunder dari instansi pemerintah lewat studi literature dan hasil penelitian terdahulu. Data lalu dikumpulkan untuk dianalisis untuk memperkuat analisis. Untuk mendapatkan data yang koheren maka dilakukan wawancara secara mendalam terhadap

pemerintah Kota sebagai pengelola program maupun warga masyarakat. Ada pun data-data yang diperoleh divalidasi melalui triangulasi data sehingga data yang diperoleh benar-benar tervalidasi keakuratannya. Sedangkan teknik analisis meliputi, reduksi data, penyajian data, interpretasi, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kelurahan Oesapa Barat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kelurahan induk (Oesapa), karena baru tahun 2006 Kelurahan Oesapa Barat mekar dari Kelurahan Oesapa. Nama Oesapa berasal dari bahasa Rote yang terdiri dari dua suku kata yaitu *Oe* (air) dan *Sapa* (haik = tempat air yang dianyam dari daun lontar). Dengan demikian, Oesapa berarti menimba air dengan menggunakan haik. Dalam kehidupan sehari-hari dikenal dengan sebutan Oesapa Besar (Oesapa Induk) dan Oesapa Kecil (sekarang Oesapa Barat). Kelurahan ini berada dalam wilayah Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang, yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kota Kupang No. 66 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kelurahan Oesapa Barat Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang.

Sebagian wilayah Kelurahan Oesapa Barat berada pada pesisir pantai sehingga wilayah tersebut di pandang cukup strategis, serta merupakan Kelurahan yang sangat heterogen, pluralis, dan majemuk di mana memiliki jumlah penduduk yang sangat padat, wilayah yang cukup luas serta mobilitasi penduduk yang cukup tinggi. Penduduk Kelurahan Oesapa Barat memiliki keberagaman suku, budaya, etnis, bahasa,

agama, kedudukan atau status sosial dan lain sebagainya, sehingga menjadi potensi utama kemajuan wilayah pemerintahannya. Kelurahan Oesapa Barat terletak pada 10 8 51.48 Bujur Timur dan 123 37 53 73 Lintang Selatan dan berada luas wilayah kelurahan Oesapa Barat mencapai + 6 KM² (6.000 M²). Adapun jumlah penduduk hingga akhir Desember 2023 sebanyak 9.978 Jiwa dengan perincian Laki-laki: 6.055 Jiwa dan Perempuan: 3.923 Jiwa. Dan jumlah Kepala Keluarga (KK) yang berdomisili di Kelurahan Oesapa Barat sebanyak 1.193 KK.

Lokasi Prioritas Penanganan Kumuh di Kelurahan Oesapa Barat

Pemerintah kota dalam rencana penataan kawasan menetapkan prioritas penanganan di Kelurahan Oesapa Barat RT 001 dan RW 001. Adapun batas-batasnya yaitu sebelah Utara berbatasan dengan Teluk Kupang, sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Timor Raya, sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Liliba, sebelah Barat berbatasan dengan sungai Oesapa Barat.



Gambar. Peta Lokus Penanganan Segmen II Muara Abu

Sumber: Arsip Kelurahan Oesapa Barat Tahun 2020

Segmen II Muara Abu dihuni oleh 188 KK dengan jumlah penduduk 968 jiwa yang menempati 229 Unit bangunan hunian. Mata pencaharian warga pada umumnya adalah nelayan, buruh harian, pegawai tetap, wirausaha dan lain-lain.

Efektivitas Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Di Kawasan Kumuh Kelurahan Oesapa Barat Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang Input

Input yang diacu dalam penelitian ini yakni pedoman yang akan dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan dimana input mempunyai pengaruh terhadap hasil, yang meliputi: (a) sumber daya manusia, (b) sumber dana/anggaran, (c) fasilitas sarana dan prasarana.

1. Sumber Daya

Pada aspek sumber daya manusia, elemen sumber daya terlibat dalam program ini yakni: Pemkot Kupang sebagai nakhoda yang bekerja sama secara kolaboratif dengan pemangku kepentingan atau aktor-aktor pemerintah dengan melibatkan masyarakat melalui Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dan Kelompok Keswadayaan Masyarakat (KSM) Ora Etlabora Oesapa Barat atau fasilitator kelurahan yang juga merupakan relawan, yang difasilitasi pembentukannya oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) selaku Kelompok Kerja (Pokja) untuk melaksanakan Program KOTAKU. Bappeda Kota Kupang merupakan pihak yang menggalai Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Sedangkan Pokja sebagai Tim Monitoring dan Evaluasi yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Kupang untuk menjalankan

pengawasan Program KOTAKU. KSM adalah pelaku langsung kegiatan program KOTAKU di level Kelurahan, khususnya di segmen Muara Abu. Terkait dengan sumber dana, karena KOTAKU merupakan program nasional yang membutuhkan sumber-sumber pembiayaan yang tidak hanya memadai dari segi jumlah namun juga bersifat terintegrasi, saling melengkapi dan tepat waktu. Maka pendanaannya berasal dari pemerintah pusat (Kementerian PUPR),

2. Sumber Dana

sedangkan untuk kebutuhan dan sumber-sumber pembiayaan Program KOTAKU diidentifikasi langsung oleh Pemkot sesuai dengan Rencana Penanganan Permukiman Kumuh tingkat Kota yang

dituangkan dalam RP2KP-KP/SIAP. Dapat digarisbawahi bahwa besaran dana untuk Program KOTAKU Muara Abu ini berasal dari Pemerintah Pusat (Kementerian PUPR) melalui dana APBN, dan juga kolaborasi dari dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melalui ABPD dengan kegiatan NUSP dan kolaborasi skala kawasan dengan perincian-perincian untuk pembangunan infrastruktur Muara Abu, seperti pembangunan jalan, drainase, sumur bor, Ruang Terbuka Publik, TPS 3R, Pelindung sungai, dan rehab RTLH. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat ada tabel di bawah ini:

Tabel 2. Daftar Kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan Skala Kawasan Segmen II Muara Abu (NUSP)

| Jenis Pekerjaan | Sumber Dana | Nilai | Lokasi | Tahun |
|--|--------------|-------------------|--|-------|
| Jalan Rabat Beton | APBN PUPR | Rp. 7.958.353.000 | RT 001/RW 001 Kel. Oesapa Barat (Segmen II) | 2022 |
| Drainase U-Dicth | APBN PUPR | Rp. 4.038.334.000 | RT 001/RW 001 Kel. Oesapa Barat (Segmen II) | 2022 |
| Sumur Bor + Bak Penampung + Instalansi Perpipaan | APBN PUPR | Rp. 890. 853.000 | RT 001/RW 001 Kel. Oesapa Barat (Segmen II) | 2022 |
| Ruang Terbuka Publik (RTP) | APBN PUPR | Rp. 1.170.860.000 | RT 001/RW 001 Kel. Oesapa Barat (Segmen II) | 2022 |

Sumber: Bappeda Kota Kupang, Tahun 2023

3. Fasilitas Sarana Dan Prasarana

Penataan Kawasan Oesapa Barat untuk pembangunan infrastruktur

(pembangunan TPS-3R, sumur bor, jalan kawasan, drainase dan pengelolaan air limbah, Ruang Terbuka Publik berupa taman) membutuhkan pengadaan atau

pembebasan tanah. Untuk pelaksanaan penataan segmen II Muara Abu Pemerintah Kota Kupang melalui Pemerintah Kelurahan telah menyiapkan 4 bidang lahan/tanah untuk penataan kawasan di RT001-RW001 Muara Abu. Ketentuan dan syarat penggunaan tanah adalah: pemegang penetapan lokasi dimanfaatkan sesuai dengan site plan, tidak diperkenankan merubah rencana site plan yang dibuat dan sebelum membangun diharuskan mengajukan ijin terhadap dinas terkait.

Rencana kebutuhan pengadaan tanah di lokasi perencanaan penataan Kawasan yang disetujui oleh Pemerintah Kota Kupang adalah seluas 6.721 m² yang merupakan tanah milik masyarakat dan Pemerintah Kelurahan Oesapa Barat. Tanah milik Pemerintah Kelurahan Oesapa Barat seluas 3.148 m². Di mana lokasi atau tanah tersebut telah digunakan untuk infrastruktur perbaikan jalan tanah menjadi beraspal, dan sumbangan 3 bidang tanah milik masyarakat seluas 3.573 m². Hanya saja yang menjadi problem dalam pengadaan tanah yakni masyarakat tidak memiliki keabsahan surat-surat tanah, selain satu bidang tanah yang bersertifikat, yang berkonsekuensi pada proses penyerahan tanah tersebut pada Pemkot.

Proses

1. Pengambilan Keputusan

Dasar kebijakan pelaksanaan penanganan permukiman kumuh di Muara Abu, Kelurahan Oesapa Barat, dilakukan dengan melihat bobot kekumuhan di tingkat kelurahan yakni Undang-Undang No.1 Tahun 2011, Surat Edaran dan Peraturan Menteri No. 2

Tahun 2016 serta petunjuk teknis program Kota Tanpa Kumuh. Pengambilan keputusan dilakukan dengan merumuskan indikator permukiman melalui 7+1, di mana aspek kriteria kekumuhan sesuai dengan Permen PUPR No. 14 tahun 2018. Sedangkan untuk pemilihan lokasi penanganan wilayah kumuh dalam mewujudkan 0 persen wilayah kumuh khususnya di Muara Abu, Kelurahan Oesapa Barat berdasarkan SK Walikota Nomor 155A/KEP/HK/2020. 7 aspek yang dimaksud adalah kondisi bangunan gedung, kondisi jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, persampahan proteksi kebakaran serta satu aspek tambahan yaitu ruang terbuka publik. Tak hanya itu, Penentuan kawasan Oesapa sebagai kawasan prioritas dalam penanganan kawasan kumuh merupakan pengadopsian konsep penataan ruang Kota Kupang sebagai Water Front City dan pembangunan infrastruktur permukiman untuk menopang keseluruhan Kawasan Oesapa yang merupakan Kawasan Strategis Ekonomi dan Pariwisata di Kota Kupang. Adapun luasan kumuh di kawasan Oesapa ini seluas 16,17 Ha. Pembangunan Skala Kawasan Oesapa, khususnya Muara Abu, adalah bagian dari upaya untuk menuntaskan permasalahan kumuh pada 7 indikator kumuh yakni: meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat khususnya yang berpenghasilan rendah, mendorong perluasan kesempatan dan penyerapan tenaga kerja, mengembangkan livelihood, serta mengubah pola hidup dan perilaku masyarakat untuk sadar lingkungan,

merawat permukiman menjadi lebih sehat, nyaman bersih dan berkualitas secara ekologis.

2. Komunikasi

Program KOTAKU menggunakan sinergi platform kolaborasi yang dilakukan dengan cara meningkatkan peran serta pemerintah daerah dan KSM untuk menekan eksistensi wilayah kumuh di Kota Kupang. Komunikasi yang dilakukan yakni dengan membangun sistem interaksi yang terpadu untuk penanganan permukiman kumuh dimana Pemkot memimpin dan berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan dalam perencanaan maupun implementasinya, dengan mengedepankan partisipasi masyarakat. Karenanya, komunikasi Pemkot Kupang dengan Balai Prasarana Permukiman Wilayah NTT serta Kementerian PUPR terus berjalan selama proses pelaksanaan Program KOTAKU di Muara Abu. Komunikasi yang intensif juga ikut memberi kontribusi bagi proses partisipasi, baik itu dengan KSM maupun masyarakat yang memberikan sumbangan tenaga dalam pengerjaan proyek, maupun dalam bentuk materi (penyediaan lahan/tanah) dalam menyukseskan Program KOTAKU. Masyarakat yang tergabung dalam BKM Ora Et Labora Oesapa Barat bekerjasama dengan Pemkot, Kelurahan, Pokja PKP, Tim Koordinator Kota dan Fasilitator, ikut aktif dalam seluruh proses pengambilan keputusan untuk penanganan permukiman kumuh di wilayahnya. Namun demikian keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Program KOTAKU Muara Abu masih rendah hal ini

merupakan implikasi dari kurangnya sosialisasi, dan penyebaran luasan informasi Program KOTAKU kepada masyarakat dan juga pola pikir masyarakat yang masih sangat bergantung pada program pemerintah, tanpa membangun inisiasi secara partisipatif dalam mendukung berbagai kerja-kerja penanganan kawasan kumuh di Muara Abu.

4.4.3 Output

Dalam pelaksanaan program KOTAKU Muara Abu, hal tersebut lebih dititikberatkan pada perbaikan pembangunan fisik. Dalam hal ini adalah Pembangunan infrastruktur melalui penataan kawasan permukiman dan lingkungan Muara Abu yang diharapkan dapat membuka akses penghidupan masyarakat secara lebih layak. Pelaksanaan kegiatan infrastruktur Skala Kawasan National Slum Upgrading Program (NSUP) KOTAKU bertujuan untuk menuntaskan permasalahan kumuh sesuai Permen PUPR No. 14 Tahun 2018 dengan 7+1 indikator kumuh, peningkatan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar pada permukiman kumuh perkotaan serta mendukung perwujudan permukiman perkotaan layak huni, produktif, dan berkelanjutan, dan mengubah pola hidup dan perilaku masyarakat untuk menata permukiman menjadi lebih bersih, sehat dan lestari. 7+1 aspek indikator kumuh itu yakni keteraturan bangunan, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, proteksi kebakaran dan satu aspek tambahan yaitu Ruang Terbuka Publik. Indikator yang

difokuskan untuk pengentasan kawasan kumuh sesuai Dokumen RPL (Rencana Penyiapan Lahan) yang dilaksanakan pada 2022 sesuai permasalahan kumuh melalui Segmen II Muara Abu Kelurahan Oesapa Barat RT 001/RW 001 yaitu: jalan lingkungan, sumur bor, Drainase, TPS-3R, Pengolahan air limbah dan indikator tambahan yaitu Ruang Terbuka Publik. Dalam hal penataan kawasan kumuh di Kelurahan Oesapa Barat khususnya di Muara Abu yakni seluas 12,6 Ha sudah tepat sasaran karena mampu mengubah wilayah tersebut jauh dari kota kumuh. Beberapa infrastruktur yang sudah dibangun seperti jalan raya. Dulunya di Muara Abu hanya memiliki jalan tanah yang sering digenangi air apalagi saat musim hujan. Dilakukan juga pembangunan pelindung sungai dan drainase bentuk U-DITCH untuk mengatasi efek banjir ROB pada musim hujan. Untuk ketersediaan air bersih bagi masyarakat dilakukan melalui pembangunan sumur bor lengkap dengan bak penampung dan instalasi perpipaan, kemudian ada juga pembangunan TPS-3R untuk mengelola sampah masyarakat, Dibangun juga Taman Muara Abu sebagai destinasi wisata bagi masyarakat khususnya Oesapa Barat dan Kota Kupang pada umumnya. Di taman ini masyarakat dapat membuka lapak jualan sebagai bagian dari sumber penghasilan untuk menopang perekonomian masyarakat Muara Abu. Selain meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur yang ada, Program ini juga telah mengubah pola hidup masyarakat menjadi lebih sehat, lebih peduli terhadap lingkungan yang menjadi lebih bersih dan

nyaman hingga pada terbentuknya perubahan pola pikir dan hidup sehat masyarakat.

Meskipun pada bagian lain nampak pemerintah belum memperhatikan kontinuitas pemeliharaan infrastruktur yang ada. Misalnya, sumur bor yang baru digunakan 2 bulan, nampak sudah menurun kualitasnya. Terlihat dari air yang keruh sehingga tidak lagi digunakan oleh masyarakat. Padahal sumur bor tersebut dibangun di atas tanah yang dihibahkan oleh masyarakat setempat. Akibatnya masyarakat di sekitar pantai Muara Abu kesulitan mengakses air bersih selain mengandalkan membeli air dari mobil tangki. Hal tersebut sudah dilaporkan ke Pemkot Kupang, namun belum ada tindak lanjut. Ini menyebabkan program KOTAKU belum dapat dikatakan berhasil jika dilihat dari indikator kebijakan Permen PUPR No. 14 Tahun 2018 yang mesyaratkan pemenuhan air bersih atau memenuhi 7+1 indikator,

Terdapat beberapa hambatan dalam indikator keberhasilan program KOTAKU di antaranya sikap sebagian masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan serta sikap tidak responsif Pemerintah dalam menanggapi pengaduan-pengaduan dari masyarakat.

KESIMPULAN

Program KOTAKU di kawasan kumuh Muara Abu sesungguhnya belum efektif untuk menekan wilayah kumuh dan berbagai ekses yang ditimbulkannya, secara holistik. Untuk kontinuitas dampaknya, ke depan program ini perlu didukung oleh partisipasi aktif dari

masyarakat sebagai pihak yang merasakan dampak positif Program KOTAKU. Untuk itu, Pemkot Kupang, termasuk BKM Ora Etlabora dan KSM setempat perlu melakukan sosialisasi yang lebih intensif dan menyeluruh kepada masyarakat terkait hakekat dan tujuan program sehingga bisa mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program tersebut. Selain itu, Pemkot juga perlu mengevaluasi pelaksanaan Program KOTAKU secara berkala untuk memastikan bahwa fasilitas yang dibangun sudah sesuai dengan syarat kualitas dan keberlanjutan, sehingga dampak dari Program ini bisa dirasakan secara kontinu oleh masyarakat khususnya Muara Abu.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Pandi. (2018). Manajemen Sumber Daya Manusia Teori, Konsep dan Indikator. Pekanbaru: Zanafa.
- Ahmad, A. A. A. (2022). Impact Of The National Program For The City Without Slums (Kotaku) On The Economic Aspect Of The Community Of Somba Opu District, Gowa Regency. *Income Journal Of Economics Development*, 1(1), 34–47. Retrieved from <https://pusdig.web.id/ekonomi/article/view/29>
- Efendi H. Pangondo, Muhammad Juang Putra, Burhanudin Burhanudin, & Hamsani Hamsani. (2023). Collaboration Strategy By Design To Achieve Slum Area Reduction Target: Case Study Of Kotaku Program Kepulauan Riau Province 2018-2022. *International Conference On Digital Advanced Tourism Management And Technology*, 1(2), 398–410. <https://doi.org/10.56910/ictmt.v1i2.101>.
- Mitasari, N. P., Wirantari, I. D. A. P., & Winaya, I. K. (2023). Kebijakan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Dalam Mewujudkan Permukiman yang Layak Huni, Produktif, dan Berkelanjutan di Desa Tembuku. *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 1(1), 34–47. <https://doi.org/10.61292/eljbn.v1i1.24>.
- Moleong, Lexy J. (2007). Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mutiarin, Dyah dan Arif, Zainuddin (2014). Manajemen birokrasi dan kebijakan. Yogyakarta: Pustaka belajar.
- Pasolong, H. (2019). Teori administrasi publik. Bandung: Alfabeta.
- Nurhasanah. (2019). “Implementasi Kebijakan Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”. *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik*. Vol. 1. No. 1. hlm. 58-70.

- Rabbani, M. G., & Marsoyo, A. (2023). Comparison of Community Responses to Clean Water Facilities The KOTAKU Program in Bekasi Regency. *ASTONJADRO*, 12(2), 395–410.
<https://doi.org/10.32832/astonjadro.v12i2.8790>.
- Rahayu Rubianti, D., Wahyuningrat, W., & Simin, S. (2020). Studi Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Desa Sokaraja Kidul . *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)*, 8(1), 33-46.
<https://doi.org/10.47828/jianaasi.an.v8i01.30>
- Ramandei, L. & Nawipa, S. . (2023). Evaluasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) terhadap Pencegahan dan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan di Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 1800–1816.
<https://doi.org/10.31004/jptam.v7i1.5491>
- Robbins, Stephen P., Timothy A. Judge. (2016). *Perilaku Organisasi Edisi 16*. Jakarta. Salemba Empat.
- Sedarmayanti. (2019). *Sumber Daya Manusia: Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil Edisi Revisi*. Bandung: Refika Aditama.
- Septanaya, I. D. M. F., Rahmawati, D., Navitas, P., & Stefanugroho, P. K. (2020). What sets it apart from the rest? Investigating the national slum upgrading program, KOTAKU, in Surabaya. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 562(1), 012031.
<https://doi.org/10.1088/1755-1315/562/1/012031>.
- Sugiyono. (2019). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Sulaiman, A. L. (2021). Proses Kolaborasi Penanganan Permukiman Kumuh Melalui Program Kota Tanpa Kumuh di Kota Bandung (Studi Kasus di Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan). *Majalah Media Perencana*, 2(1), 1-23.